



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia untuk
Mendukung Pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah**

Skripsi

Oleh

Claudia Isabella

2014330092

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia untuk
Mendukung Pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah**

Skripsi

Oleh
Claudia Isabella
2014330092

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia untuk
Mendukung Pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah**

Skripsi

Oleh
Claudia Isabella
2014330092

Pembimbing
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Claudia Isabella
Nomor Pokok : 2014330092
Judul : Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia untuk Mendukung Pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 22 Desember 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudia Isabella

NPM : 2014330092

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri
Rusia untuk Mendukung Pemerintah Bashar al-Assad
pada Konflik Suriah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila di kemudian diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Desember 2017



Claudia Isabella

ABSTRAK

Nama : Claudia Isabella

NPM : 2014330092

Judul : Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia untuk Mendukung Pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah.

Dalam perkembangan Kebijakan Luar Negeri Rusia, negara-negara dalam kawasan Timur Tengah bukan menjadi prioritas yang utama. Hal ini terbukti dengan perannya yang pasif dalam kawasan tersebut. Namun sepanjang berlangsungnya Konflik Suriah, Rusia kemudian terlibat secara aktif untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad dengan bantuan diplomatik dan militer. Pencapaian kepentingan nasional Rusia menjadi alasan utama bagi keterlibatannya dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri Rusia untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teknik studi literatur. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Pada dasarnya, Nuechterlein menekankan kepentingan nasional pada empat kategori; kepentingan pertahanan, kepentingan tatanan dunia, kepentingan ekonomi, dan kepentingan ideologi.

Melalui analisis yang dilakukan berdasarkan kerangka konsep kepentingan nasional, penulis menemukan tiga kepentingan nasional Rusia dalam mendukung pemerintah Bashar al-Assad. Yang pertama adalah kepentingan pertahanan yang meliputi permasalahan terorisme internasional dan ancaman penyebarannya di dalam teritori Rusia, khususnya wilayah Kaukasus Utara. Yang kedua adalah kepentingan tatanan dunia, terdiri dari; penegasan anti demokratisasi Barat, serta mempertahankan aliansi tradisional di Timur Tengah. Konflik ini juga dianggap sebagai salah satu momentum untuk mengkonsolidasikan posisi Rusia sebagai kekuatan besar di dunia. Selain itu, keterlibatan Rusia juga didorong dengan adanya kepentingan ekonomi, antara lain melindungi mitra dagang terbesar di kawasan Timur Tengah, ekspansi pasar Rusia, serta mengamankan jalur pipa minyak/gas dalam kawasan.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Kebijakan Luar Negeri Rusia, Konflik Suriah.

ABSTRACT

Name : Claudia Isabella

NPM : 2014330092

Title : *National Interests in Russian Foreign Policy to Support the Government of Bashar al-Assad on the Syrian Conflict.*

In the development of Russian Foreign Policy, countries in the Middle East region are not considered a high priority. This is evident with Its passive role in the region. However, during the Syrian Conflict, Russia was actively involved in supporting the Government of Bashar al-Assad with diplomatic and military assistance. The achievement of national interests for Russia is the main reason for Its involvement in the conflict. Therefore, the main purpose of this research is to explain the national interests in Russian Foreign Policy to support the government of Bashar al-Assad on the Syrian Conflict. This research was conducted in a qualitative method and applied the technique of literature study. To answer the research question, the concept of national interest by Donald E. Nuechterlein was applied as the groundwork in this research. Fundamentally, Nuechterlein emphasized the national interest in four categories; defense interest, world order interest, economic interest, and ideological interest.

Throughout the analysis that was conducted under the framework of the national interest concept, there are three findings of the Russian national interests in supporting the government of Bashar al-Assad. The first is the defense interest that encompasses the issue of international terrorism and its spread within Russian territory, specifically Northern Caucasus region. The second is the world order interests, which consist of; affirmation of Anti Democratization by the West, as well as maintaining traditional alliance in the Middle East. This conflict was also regarded as one of the momentum to consolidate Russia's position as a great power in the world. Furthermore, the Russian involvement was encouraged by the economic interests, which consist of; the protection of one of the largest trading partners in the Middle East region, the expansion of Russian market, and the protection of the oil/gas pipelines in the region.

Key Words: National Interest, Russian Foreign Policy, Syrian Conflict.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang di beri judul **Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia untuk Mendukung Pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah**. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan nasional Rusia melalui keterlibatannya secara instrumen diplomatik dan militer dalam Konflik Suriah pada tahun 2011-2017. Penelitian ini diharapkan dapat merevitalisasi pembahasan mengenai kepentingan nasional, dikarenakan hal tersebut penting untuk memahami kebijakan luar negeri suatu negara.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan ataupun argumentasi yang diberikan. Penulis mengharapkan saran, kritik, serta rekomendasi yang dapat menyempurnakan penelitian serupa selanjutnya. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. atas bimbingannya selama proses penelitian ini.

Bandung, 15 Desember 2017

Claudia Isabella

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan. Melalui berkat dan tuntunan-Nya, saya dapat menyelesaikan masa studi selama 3,5 tahun melalui penulisan skripsi ini dengan hasil yang memuaskan.
2. Kepada orang tua terkasih dan sumber motivasi terbesar, Ibu Luisje Jenny Suak dan Bapak Daulat Kalangit, atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan tiada henti. Gelar Sarjana Ilmu Politik ini saya dedikasikan untuk Papa dan Mama. Semoga ini merupakan awal dari perjuangan untuk hasil yang lebih membanggakan bagi kalian berdua.
3. Kepada pembimbing terbaik, Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. atau yang lebih dikenal sebagai Mas Adri. Terima kasih atas masukan, arahan, dan berbagai diskusi yang telah dilakukan terutama dalam proses pembentukan ide dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada yang terhormat kedua penguji sidang skripsi, Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D dan Idil Syawfi, S.IP., M.Si. Terima kasih atas masukan dan saran yang semakin melengkapi hasil dari penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman terdekat semasa kehidupan di Gedung 3; Annisa Laksmintari, Pita RF Ramadhani, Zabrina Vicky, Camilia Adianti, Anindita Ausarina, Malvin Villio, Maria Claudia, dan Andrea Celine. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka dalam perjuangan yang berat ini. Ku doakan kalian sukses selalu kedepannya!
6. Lords of the Ring; Antonius Reynaldo, Adriana Anjani, Saraswati Kartika Malta, Sherly Mega Putri, Andini Putri. Terima kasih atas kerja keras dan kekeluargaan kita selama satu periode. Terlebih untuk, Bendahara II HMPSIHI 2016/2017, Andri Watto Putra. I couldn't ask for a better partner. Semoga kita bisa kerja bareng lagi di lain kesempatan.
7. Jamhuri ya Kenya! The delegates of the Republic of Kenya for Diplomacy in Practice 2017; Agatha Lydia, Annisa Laksmintari, and Adriana Anjani. Thank you for the togetherness through the ups-and-downs, also the sweat and tears. We'll see each other on top, soon!

8. Seluruh mahasiswa HI UNPAR Angkatan 2014!
9. Seluruh pihak yang namanya tidak tercantumkan di dalam ucapan terima kasih ini yang telah memberikan dukungan, baik berupa doa, moril maupun materil, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.
10. At last, for Claudia Isabella, thank you for being strong enough against all the self-doubt and anxieties that your mind put you through. You've done well and I'm proud of you. Brace yourself! This is just the beginning of another battle.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.6.1 Metode Penelitian.....	15
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DAN KONFLIK SURIAH.....	19
2.1 Perkembangan Kebijakan Luar Negeri Rusia.....	19
2.1.1 Berakhirnya Perang Dingin.....	19

2.1.2	Era Presiden Boris Yeltsin: Timbulnya Berbagai Pandangan Mengenai Arah Kebijakan Luar Negeri.....	21
2.1.3	Era Presiden Vladimir Putin Periode 2000-2008.....	25
2.1.4	Era Presiden Dmitry Medvedev pada tahun 2008-2012.....	31
2.1.5	Era Presiden Vladimir Putin pada tahun 2012-2018	34
2.2	Konflik Suriah.....	36
2.2.1	Penyebab yang Mendasari Terjadinya Konflik Internal di Suriah	37
2.2.1.1	Faktor Ekonomi: Kebijakan Liberalisasi yang Meningkatkan Permasalahan Ekonomi	37
2.2.1.2	Faktor Politik: Sistem Otoritarianisme.....	40
2.2.1.3	Faktor Persepsi/Kultural: Dominasi Etnis Minoritas Alawi dalam Pemerintahan Assad.....	46
2.2.1.4	Faktor Struktural: Lemahnya Institusi Pemerintah dan Munculnya Kelompok-Kelompok Oposisi.....	48
2.2.2	Keberlangsungan Konflik Suriah pada tahun 2011 – 2017	49

**BAB III KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DALAM KONFLIK
SURIAH DAN KEPENTINGAN NASIONAL UNTUK
MENDUKUNG PEMERINTAH PRESIDEN BASHAR AL-
ASSAD.....57**

3.1	Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Konflik Suriah.....	57
3.1.1	Penerapan Instrumen Diplomasi pada Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Konflik Suriah.....	58
3.1.2	Penerapan Instrumen Militer pada Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Konflik Suriah.....	63
3.2	Kepentingan Nasional Rusia Untuk Mendukung Pemerintah Bashar al- Assad.....	69
3.2.1	Kepentingan Pertahanan: Permasalahan Terorisme Internasional.....	69
3.2.2	Kepentingan Tatanan Dunia	77
3.2.2.1	Penegasan Sikap Anti Demokratisasi Barat	77
3.2.2.2	Mempertahankan Suriah sebagai Aliansi Rusia di Timur Tengah dan Mengkonsolidasikan Posisi Rusia sebagai Kekuatan Besar di Dunia.....	81

3.2.3	Kepentingan Ekonomi	84
BAB IV KESIMPULAN.....		90
DAFTAR PUSTAKA.....		93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kontrol Teritori Suriah pada 14 September 2015.....	53
Gambar 2.2	Peta Kontrol Teritori Suriah pada 2017.....	54
Gambar 2.3	Total Korban Jiwa Akibat Penyiksaan oleh Pemerintah pada Tahun 2016.....	55
Gambar 3.1	Serangan Rusia dalam Teritori Suriah.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pandangan Mengenai Arah Kebijakan Luar Negeri Pasca Uni Soviet.....	23
Tabel 2.2	Pernyataan 99 dan Pernyataan 1.000.....	45
Tabel 3.1	Daftar Anggota Teroris yang Memiliki Kewarganegaraan Rusia....	74
Tabel 3.2	Negara Tujuan Ekspor Rusia di Kawasan Timur Tengah pada tahun 2011.....	85
Tabel 3.3	Ketersediaan Minyak dan Gas Alam dalam Beberapa Negara di Timur Tengah.....	87

DAFTAR SINGKATAN

BRIC	: <i>Brazil, Russia, India, China</i>
CSTO	: <i>Collective Security Treaty Organization</i>
EAEU	: <i>Eurasian Economic Union</i>
EurAsEc	: <i>Eurasian Economic Community</i>
FSA	: <i>Free Syrian Army</i>
G7	: <i>Group of Seven</i>
GWoT	: <i>Global War on Terror</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
ISSG	: <i>International Syria Support Group</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NRC	: <i>NATO-Russia Council</i>
PBB	: <i>Persatuan Bangsa-Bangsa</i>
R2P	: <i>Responsibility to Protect</i>
SAMI	: <i>Saudi Arabian Military Industries</i>
SCO	: <i>Shanghai Cooperation Organisation</i>
SNC	: <i>Syrian National Council</i>
SNHR	: <i>Syrian Network for Human Rights</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan Kebijakan Luar Negeri Rusia pada tahun 2008, 2013, sampai 2016, kawasan Timur Tengah bukanlah salah satu kawasan yang termasuk dalam prioritas utama. Dalam konsep kebijakan tersebut, terlihat bahwa prioritas utama berada pada negara-negara Persemakmuran Negara Merdeka, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat.¹ Meskipun demikian, kawasan ini selalu menjadi arena pertempuran ‘pengaruh’ dan kepentingan oleh negara-negara besar dikarenakan dinamika politiknya yang selalu berubah, serta wilayahnya yang kaya akan sumber daya alam strategis. Hal inipun tidak terlepas dari Rusia. Kawasan ini tetap dianggap penting dikarenakan beberapa alasan; yang pertama adalah alasan geografis yakni perbatasannya langsung dengan negara-negara ex-Soviet.² Alasan lainnya adalah populasi muslim, serta peran Amerika Serikat yang begitu dominan di kawasan tersebut, terutama dalam penyebaran prinsip demokrasi melalui intervensi dalam permasalahan internal negara.³

Kebijakan luar negeri Rusia dalam kawasan Timur Tengah dapat dikatakan fluktuatif sejak masa Pra-Soviet. Dalam masa Pra-Soviet Rusia, negara ini lebih berfokus kepada kawasan Semenanjung Mediterania, Persia, Asia Tengah, dan

¹ Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. *The Foreign Policy Concept of the Russian Federation Approved by the President of Russian Federation on 28 June 2000.*

² Dmitri Trenin, “Russia’s Policy in the Middle East: Prospect for Consensus and Conflict with the United States,” *The Century Foundation Report* (NY: The Century Foundation Inc., 2010): hlm 3-4.

³ *Ibid.*

Tiongkok.⁴ Keadaan berubah ketika berlangsungnya masa Uni Soviet sejak tahun 1922, terutama pada masa Perang Dingin. Timur Tengah dianggap sebagai arena kompetisi bagi kedua pihak untuk memperluas pengaruh. Uni Soviet berusaha untuk menyebarkan pendekatan berorientasi sosialis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kepada negara-negara di kawasan ini. Salah satunya dengan mendukung negara-negara yang dianggap sebagai ‘pijakan’ Soviet dalam kawasan seperti Irak, Libya, dan khususnya Suriah.⁵

Pada masa ini, Suriah dianggap penting di antara negara Arab lainnya dikarenakan beberapa hal, yakni; lokasi geopolitiknya yang memberikannya posisi untuk mengelilingi Turki dan Irak yang merupakan negara Pro-Barat, serta eksistensi Partai Komunis Suriah yang sudah memperluas pengaruhnya.⁶ Hubungan bilateral kedua negara pun semakin erat ketika Presiden Hafez al-Assad yang berasal dari partai Ba’ath menjabat sebagai presiden. Diakhir masa kepemimpinannya, Mikhail Gorbachev terus mengurangi peran Uni Soviet di kawasan Timur Tengah, yang kemudian berdampak pada hubungan dengan Suriah. Salah satunya yang dilakukan adalah mendekatkan diri pada negara aliansi Amerika Serikat dengan dukungan terhadap Israel dalam konflik Arab-Israel.⁷

Pada masa berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, Uni Soviet kemudian terpecah dan menghasilkan Federasi Rusia sebagai negara penerus. Rusia memang merupakan negara yang berbeda dengan Uni Soviet dalam hal geografis maupun

⁴ Alexey Malashenko, *Russia and the Arab Spring*, (Moscow: Carnegie Moscow Center, 2013): hlm. 3

⁵ *Ibid.*, hlm. 4

⁶ Andrej Kreutz, *Russia in the Middle East: Friend or Foe?*, (CT: Praeger Security International, 2007): hlm. 13

⁷ Ilya Bourtnan, “Putin and Russia’s Middle Eastern Policy,” *Middle Eastern Review of International Affairs Vol. 10 No. 2* (2006): hlm. 3.

populasi penduduk. Selain itu, dalam kebijakan luar negeri, Rusia tidak lagi berpatok dalam ideologi, melainkan dalam kepentingan pragmatis dan geopolitik.⁸

Fokus kebijakan luar negeri Rusia terhadap kawasan Timur Tengah pun semakin mengalami penurunan dari masa Uni Soviet. Terutama pada masa kepemimpinan Presiden Boris Yeltsin, yang kemudian lebih memprioritaskan untuk memperbaiki hubungan dengan Barat. Selain itu, dengan adanya negara-negara Ex-Soviet yang baru memperoleh kemerdekaan. Negara-negara inilah yang kemudian menjadi fokus utama dari Rusia, dengan bagaimana Ia berusaha mempertahankan pengaruh terhadap negara-negara tersebut dan menjauhkannya dari pengaruh Amerika Serikat dan NATO. Kebijakan luar negeri ini disebut dengan kebijakan ‘*Near Abroad*’, yang juga dianggap sebagai “*Russia’s Monroe Doctrine*.”⁹ Pada kebijakan luar negeri di masa kepemimpinan Presiden Vladimir Putin kemudian memunculkan keinginan untuk mengaktifkan hubungan Rusia dengan aliansi tradisionalnya di Timur Tengah.¹⁰ Meskipun demikian, kawasan tersebut tetap tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Rusia.

⁸ Roland Dannreuther, “Russia and the Middle East” dalam *The Middle East’s Relations With Asian and Russia* Ed. Tom Pierre Najem and Martin Hetherington (London: RoutledgeCurzon, 2004): hlm. 23.

⁹ Robert O. Freedman, “Moscow and the Middle East Since the Collapse of the Soviet Union: A Preliminary Analysis” dalam *The Foreign Policy of the Russian Federation* Ed. Roger E. Kanet dan Alexander V. Kozhemiakin, (NY: ST. Martin’s Press Inc., 1997): hlm. 128.

¹⁰ Roland Dannreuther, *Op. Cit.*, hlm. 33.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada tahun 2011 ketika gelombang demokratisasi melanda negara-negara kawasan Timur Tengah, Rusia kemudian terlibat aktif dalam memberikan dukungan diplomatik dan militer kepada Suriah. Fenomena demokratisasi ini ditandai dengan adanya revolusi masyarakat untuk menentang rezim pemerintahan yang otoriter dan sudah memimpin untuk waktu yang lama.¹¹ Berawal di Tunisia pada tahun 2011, dengan protes rakyat untuk menjatuhkan rezim Ben Ali, pada tahun yang sama, revolusi kemudian menyebar dan terjadi di Mesir yang berakhir dengan kejatuhan rezim Hosni Mubarak. Hal ini diikuti oleh protes di Libya yang berakhir dengan diadilinya Presiden Moammar Gaddhafi, diikuti beberapa protes dari rakyat Yaman dan Bahrain.¹² Suriah pun tidak luput dari fenomena tersebut. Dengan adanya protes di negara-negara tetangganya pada saat yang sama, seperti di Mesir dan Libya, kemudian mendorong rakyat Suriah untuk melakukan hal yang serupa.

Dengan adanya demokratisasi ini kemudian menuntut beberapa negara – baik yang berada dalam kawasan Timur Tengah maupun tidak – harus menyesuaikan kebijakan luar negeri dalam merespon apa yang terjadi di kawasan ini. Salah satunya adalah Rusia, yang memiliki hubungan yang baik dengan beberapa negara, salah satunya adalah Suriah. Keterlibatannya secara aktif pun merupakan salah satu kunci utama dalam bertahannya rezim Presiden Assad selama konflik berlangsung.

¹¹ Mark L. Haas dan David W. Lesch, *The Arab Spring: Change and Resistance in the Middle East*, (CO: Westview Press, 2013): hlm. 1

¹² “The ‘Arab Spring’: Five Years On,” *Amnesty International*, diakses pada 6 Februari 2017, <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>

Konflik di Suriah seringkali menjadi topik pembahasan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Meskipun demikian, konsensus juga merupakan suatu hal yang sulit dicapai. Ini terjadi terutama pada resolusi yang menuntut Presiden Assad untuk turun dari jabatan atau segala tindakan intervensi kemanusiaan seperti yang terjadi di Libya, selalu mendapatkan veto dari Rusia dan beberapa kali diikuti oleh veto dari Tiongkok. Tercatat setelah 6 tahun konflik berjalan, Rusia sudah melakukan 8 kali veto. Selain dalam Dewan Keamanan PBB, Rusia juga ikut terlibat dalam konflik melalui intervensi militernya pada 30 September 2015 setelah mendapatkan permintaan dukungan dari Presiden Bashar al-Assad.¹³ Intervensi ini pun kemudian menarik perhatian dunia. Hal ini dikarenakan ini merupakan pertama kalinya Rusia terlibat secara operasi militer dalam negara yang bukan bagian dari Uni Soviet ataupun Pakta Warsawa sejak berakhirnya Perang Dingin.

Kebijakan luar negeri Rusia untuk terlibat secara aktif merupakan salah satu cara untuk menegaskan presensinya dalam kawasan tersebut yang juga didukung oleh adanya kepentingan nasional. Hal ini merupakan salah satu visi yang dibawa oleh Presiden Putin, yaitu dimana Ia menyatakan ingin Rusia berpartisipasi secara aktif dalam tatanan global dan semua hal yang dilakukan adalah berdasarkan kepentingan dan tujuan dari Rusia.¹⁴ Selanjutnya, penulis memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai kepentingan nasional dalam kebijakan luar

¹³ "Syria's Assad Wrote to Putin Over Military Support: Statement," *Reuters*, <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-putin-idUSKCN0RU17Y20150930>, diakses pada 27 Agustus 2017.

¹⁴ Robert H. Donaldson et al., *The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests* (New York: Routledge, 2014), hlm. 409.

negeri Rusia yang mendorong keterlibatannya mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad pada Konflik Suriah.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian memiliki pembatasan dalam fokus pembahasan yakni mengenai kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri Rusia untuk mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad dalam Konflik Suriah. Dalam melakukan pembahasan mengenai berbagai keterlibatan Rusia dilakukan hanya dalam penerapan instrumen diplomatik dan militer dikarenakan kedua bidang tersebut paling mendominasi. Ruang lingkup waktu akan dibatasi dari tahun 2011 sampai pada pertengahan tahun 2017. Tahun 2011 merupakan tahun dimana penyebaran gelombang demokratisasi pertama kali terjadi di Suriah. Selain itu, pada tahun yang sama juga merupakan awal dukungan Rusia terhadap pemerintah Bashar al-Assad dalam konflik tersebut. Hal ini ditunjukkan berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yakni untuk tidak dilakukannya dukungan pada gerakan anti-pemerintah, terutama dengan kekuatan militer seperti yang terjadi di Libya.¹⁵ Sedangkan lingkup waktu penelitian ini akan berakhir pada bulan September tahun 2017 dengan dinyatakan bahwa telah dibebaskannya 85% teritori Suriah dari kelompok bersenjata yang ilegal.¹⁶ Selain itu, dalam kurun waktu 6 tahun tersebut banyak terjadi polemik antara Rusia dalam keterlibatannya di Suriah.

¹⁵ Henry Meyer, Brad Cook, dan Ilya Arkhipov, "Russia Warns US, EU Not to Aid Syria Protests After Libya," *Bloomberg*, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-06-01/russia-warns-u-s-nato-against-military-aid-to-syria-protests-after-libya>, diakses pada 5 Desember 2017.

¹⁶ "85% of Syria Liberated from ISIS by SAA Troops Supported by Russian Aerospace Forces," – Ministry of Defence of the Russian Federation.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulisan ini akan disusun untuk menjawab pertanyaan:

“Apa kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri Rusia untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri Rusia untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad. Selain itu, penulisan ini juga akan memberikan gambaran mengenai penerapan instrumen diplomatik dan militer dalam keterlibatan Rusia pada Konflik Suriah. Melalui penulisan ini juga ditujukan untuk merevitalisasi pembahasan mengenai kepentingan nasional, dikarenakan ini merupakan suatu hal yang penting dalam mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi para pembaca terkait kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri Rusia untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad pada Konflik Suriah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peminat studi hubungan internasional yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai kebijakan luar negeri Rusia di Suriah.

1.4 Kajian Literatur

Pada bagian ini, penulis memaparkan beberapa perdebatan mengenai alasan dibalik keterlibatan Rusia secara aktif dalam konflik Suriah. Spyridon Plakoudas dalam jurnal *Middle East Review of International Affairs Vol. 19* pada tahun 2015 yang berjudul “*Putin, Assad, and Geopolitics*” memiliki pandangan bahwa keterlibatan Rusia bertujuan untuk melindungi kepentingan vitalnya di wilayah Timur Mediterania. Hal ini dilakukan dengan mendukung salah satu aliansi tradisionalnya, yakni Suriah, yang sedang terancam gelombang revolusi yang melanda rezim-rezim otoriter di Timur Tengah. Plakoudas juga menyatakan bahwa akhir dari Konflik Suriah tidak hanya akan berpengaruh pada keseimbangan kekuatan dalam kawasan Timur Tengah, tetapi juga membentuk situasi geopolitik di Eurasia. Ini dianggap merupakan suatu momentum bagi Presiden Vladimir Putin untuk mengembalikan kejayaan Rusia sebagai kekuatan besar di dunia seperti sebelum akhir era Perang Dingin.

Sementara menurut Azuolas Bagdonas dalam jurnal *European Journal of Economic and Political Studies* pada tahun 2015 yang berjudul “*Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit*” menyatakan bahwa keterlibatan Rusia dikarenakan adanya kepentingan militer, kepentingan ekonomi, dan konsiderasi keuntungan strategis. Kepentingan militer yang dimaksud adalah eksistensi pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus yang memungkinkan kapal Rusia untuk mengisi bahan bakar di Laut Mediterania tanpa harus kembali ke pangkalan di Laut Hitam. Bagdonas berpendapat bahwa ada kekhawatiran bahwa jika terjadi pergantian rezim di Suriah akan berpengaruh terhadap kesepakatan

perjanjian dan berujung pada penutupan pangkalan tersebut. Sementara dalam kepentingan ekonomi, kedua negara dianggap memiliki hubungan ekonomi yang baik sejak masa Uni Soviet, terutama dalam hal perdagangan senjata, investasi perusahaan-perusahaan Rusia, dan kerja sama dalam sektor energi. Sama seperti Plakoudas, Bagdonas juga berpendapat bahwa dengan keterlibatan Rusia ini dapat menjadikannya sebagai kekuatan besar yang kepentingannya harus diakomodasi atau diperhitungkan.

Berbeda dengan dua literatur sebelumnya, Alexander Vysotsky dalam jurnal *The Quarterly Journal Vol. XIV* pada tahun 2014 yang berjudul “*Russia and the Arab Spring*” menjelaskan bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi keterlibatan Rusia. Faktor ini kemudian lebih difokuskan pada kelompok Islamis, kebijakan Amerika Serikat dan pengaruh Barat. Faktor pertama adalah kelompok para Islamis, dimana *Arab Spring* dianggap mendukung peningkatan kekuatan kelompok-kelompok tersebut yang dianggap beresiko terhadap keamanan nasional. Selain itu, faktor kedua berkaitan dengan Kebijakan Amerika Serikat terhadap Irak pada masa pemerintahan Presiden Bush Jr. Salah satu kebijakan tersebut adalah ‘*Greater Middle East*’ yang dianggap sebagai suatu kegagalan dan berujung pada apa yang terjadi saat ini di kawasan tersebut. Faktor keempat, berhubungan dengan kebijakan ‘*Greater Middle East*’. Hal ini adalah intervensi Amerika Serikat dalam proses pemerintahan di Palestina yang berujung pada kemenangan Hamas dalam pemilihan umum tahun 2006, yang berakibat pada konflik. Sementara dua faktor terakhir adalah mengenai permasalahan kedaulatan dan konflik internal dalam Suriah itu sendiri.

Penulisan Roy Allison dalam jurnal *International Affairs* 89 pada tahun 2013 yang berjudul "*Russia and Syria: Explaining Alignment with a Regime in Crisis*" memiliki pandangan yang serupa dengan penulis sebelumnya. Posisi Rusia dalam konflik ini salah satunya dapat dijelaskan sebagai suatu ekspresi kecemasan atau ketakutan Moskow terhadap intervensi Barat sejak dahulu dan tetap menjadi prioritas utama sampai saat ini. Selain itu, intervensi militer di Libya yang berujung dengan dijatuhkannya rezim Muammar Gaddafi juga menjadi salah satu pengaruh besar. Hal ini dikarenakan seperti yang telah disebutkan di dalam penulisan sebelumnya, dengan adanya kekosongan kekuasaan dalam negara yang terkena *Arab Spring* akan meningkatkan aktivitas kelompok-kelompok radikal di dalam negara tersebut. Inilah yang dianggap terjadi di Libya. Ia juga menyatakan bahwa poin terpenting adalah posisi Rusia tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap legitimasi politik dan kohesi antara Rusia dan negara-negara CIS.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, keempat literatur di atas dapat dijadikan pedoman dan dapat berkontribusi dalam penulisan ini. Keempat penulis literatur di atas memiliki fokus yang berbeda-beda dalam menjelaskan alasan-alasan tersebut, sehingga menunjukkan adanya berbagai sudut pandang dalam pembahasan mengenai fenomena ini. Sejalan dengan literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis beranggapan bahwa keterlibatan Rusia dalam Konflik Suriah memang didukung oleh suatu alasan, yakni pencapaian kepentingan nasional. Yang kemudian membedakan keempat literatur tersebut dengan penelitian ini adalah pembahasan yang lebih luas dan lebih mendalam

dengan menggabungkan segala perspektif dan memperdalam dari segi data yang disajikan dan diaplikasikan dalam konsep kepentingan nasional yang dinyatakan oleh Donald E. Nuechterlein. Maka dari itu, kajian yang dilakukan diharapkan akan melengkapi segala pembahasan mengenai alasan keterlibatan Rusia dalam Konflik Suriah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menjabarkan kerangka konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Fondasi pertama dari penelitian ini adalah paradigma Realisme yang memiliki pandangan bahwa aktor utama dalam politik internasional adalah negara yang dikategorikan sebagai unit analisis utama (*state-centric approach*) dalam penelitian Hubungan Internasional.¹⁷ Negara juga merupakan suatu aktor yang rasional. Rasionalitas yang dimaksud adalah bagaimana negara akan selalu mengkalkulasi setiap pilihan, serta keuntungan dan pengorbanan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.¹⁸ Kebijakan luar negeri sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan suatu negara, serta interaksinya dengan aktor atau fenomena yang berada di luar perbatasan wilayah mereka.¹⁹ Dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, ini juga dapat dikategorikan sebagai studi makro-politik dengan menjelaskan mengenai interaksi negara dalam kawasan regional maupun dalam

¹⁷ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, (IL: Pearson Education Inc, 1999), hlm. 39.

¹⁸ Paul D'Anieri, *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*, (US: Wadsworth Cengage Learning, 2012): hlm. 63.

¹⁹ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, (NY: Palgrave Macmillan, 2007): hlm. 5.

sistem internasional. Selain itu, melalui analisa kebijakan luar negeri juga dapat memungkinkan untuk berfokus pada interaksi negara sebagai aktor untuk menganalisa bagaimana tren historis dan pergeserannya dalam politik internasional dalam skala dan jangka waktu tertentu.²⁰ Kebijakan luar negeri juga tidak dapat terlepas dengan konsep kepentingan nasional.

Kepentingan nasional bertujuan sebagai alat untuk menganalisa, mendeskripsikan, menjelaskan, serta mengevaluasi kebijakan luar negeri suatu negara.²¹ Sebaliknya, kebijakan merupakan alat bagi negara untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai dalam kepentingan mereka.²² Di sisi lain, definisi kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein dinyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan suatu kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat melalui hubungannya dengan negara berdaulat lainnya dalam suatu lingkungan eksternal.²³

Nuechterlein kemudian membagi kepentingan nasional ke dalam empat kategori dasar, yakni kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Kepentingan pertahanan diartikan sebagai perlindungan terhadap negara beserta warga negaranya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain, dan/atau ancaman yang

²⁰ Stephen G. Walker, Akan Malici, dan Mark Schafer, *Rethinking Foreign Policy Analysis: States, Leaders, and the Microfoundation of Behavioral International Relations*, (NY: Routledge, 2011), hlm. 6.

²¹ Joseph Frankel, *Key Concept in Political Science: National Interest*, (London: Palgrave Macmillan, 1970): hlm, 16.

²² Glenn Palmer dan T. Clifton Morgan, *A Theory of Foreign Policy*, (New Jersey: Princeton University Press, 2006): hlm. 2.

²³ Donald E. Nuechterlein, "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Approach for Analysis and Decision-Making," *British Journal of International Studies Vol. 2 No. 3* (1976): hlm. 248.

terinspirasi dari lingkungan eksternal terhadap sistem pemerintahan.²⁴ Kepentingan ekonomi dicapai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain.²⁵ Sementara itu, kepentingan tatanan dunia berkaitan dengan pemeliharaan kerangka politik dan ekonomi internasional dimana negara merasa aman, serta dimana warga negara dan sistem perdagangannya terlindungi di luar batas negara. Sementara kategori yang terakhir adalah kepentingan ideologi yang merupakan suatu perlindungan terhadap seperangkat nilai yang dimiliki dan dipercaya baik untuk diterapkan di seluruh dunia.²⁶ Seperangkat nilai ini yang dapat membantu memahami dalam “siapa kita? Apa nilai yang kita perjuangkan?”²⁷

Dalam menentukan urutan prioritas dari setiap kategori kepentingan nasional tersebut, penulis akan menggunakan pemikiran Robert J. Art. Menurut Art, prioritas kepentingan nasional dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan, yakni kepentingan nasional vital, kepentingan nasional sangat penting, dan kepentingan nasional penting.²⁸ Kepentingan vital merupakan suatu kepentingan yang tidak tercapai akan membawa kerugian yang sangat besar atau bencana bagi negara. Keamanan merupakan suatu kepentingan vital bagi negara, yakni berhubungan dengan bagaimana menjaga teritori negara secara fisik dari serangan, invasi, dan destruksi, serta mempertahankan kedaulatannya.²⁹ Kepentingan sangat penting merupakan suatu kepentingan yang bila tercapai akan membawa keuntungan yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics*, (NJ: Pearson Education Inc., 2013): hlm. 188.

²⁸ Robert J. Art, *A Grand Strategy for America*, (NY: Cornell University Press, 2003): hlm. 45.

²⁹ *Ibid.*

sangat besar bagi negara. Sebaliknya, jika kepentingan tersebut tidak tercapai akan memberikan kerugian namun tidak menimbulkan suatu bencana. Sedangkan kepentingan yang penting merupakan suatu kepentingan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan dapat berkontribusi terhadap pembentukan lingkungan internasional agar sesuai dengan kepentingan negara tersebut. Jika tidak tercapai kerugian yang didapatkan tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan dua tingkatan sebelumnya.³⁰

Di sisi lain, Howard H. Lentner kemudian menyebutkan terdapat lima jenis instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk pencapaian kepentingan nasional tersebut, yakni politik, diplomatik, informasi, ekonomi, dan militer.³¹ Dalam penulisan ini, penulis akan menekankan pada instrumen diplomasi dan militer. Penerapan instrumen diplomasi ditunjukkan dengan adanya individu yang memiliki kemampuan dan menjadi representatif bagi pemerintah negaranya, serta menjalani fungsi melakukan pelaporan, negosiasi dan persuasi dalam suatu misi diplomatik.³² Selain instrumen militer ditandai dengan adanya penggunaan material seperti persenjataan dan alat lainnya yang bersifat destruktif, serta personil yang memiliki kemampuan dalam persenjataan, penyusunan strategi/taktik, serta penanganan suatu organisasi angkatan bersenjata.³³

Dalam penulisan ini, berdasarkan paradigma Realisme, kebijakan luar negeri Rusia memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengamankan posisinya di tengah politik internasional

³⁰ *Ibid*, hlm. 46.

³¹ Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, (Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1974): hlm. 216.

³² *Ibid.*, hlm. 217.

³³ *Ibid.*, hlm. 220.

yang bersifat anarki. Konflik Suriah merupakan salah satu momentum untuk mewujudkan hal tersebut dan kemudian mendorong Rusia untuk bertindak suportif terhadap Pemerintahan Bashar al-Assad yang ditunjukkan melalui penerapan instrumen diplomasi dan militer. Kepentingan nasional tersebut dapat diartikan dalam beberapa bentuk, seperti permasalahan terorisme, konsolidasi posisi Rusia sebagai kekuatan besar di dunia, menjaga Suriah sebagai aliansi tradisional di Timur Tengah, serta keuntungan yang akan didapatkan secara ekonomi. Hal ini kemudian akan dijelaskan dalam kerangka konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein yang dilengkapi dengan skala prioritas kepentingan nasional oleh Robert J. Art.

Kerangka pemikiran ini diharapkan dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian, serta menuntun penulis selama proses penelitian. Pada dasarnya kerangka pemikiran ini telah mencakup hal-hal penting yang diperlukan, seperti penjelasan instrumen kebijakan luar negeri dan analisa mengenai konsep kepentingan nasional.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. John Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi, pandangan dunia, dan penggunaan kerangka teoritis dalam meneliti suatu permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kehidupan manusia.³⁴ Metode

³⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (California: Sage Publications, Inc., 2007): hlm. 34.

kualitatif memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah peneliti merupakan instrumen kunci, yang diartikan bahwa peneliti kualitatif yang melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi berbagai macam sumber data, seperti interview, observasi langsung, dan studi dokumen atau literatur. Peneliti kualitatif dalam melakukannya penelitiannya juga menggunakan suatu kerangka teoritis untuk menganalisis permasalahan yang ada.³⁵ Pertanyaan penelitian dalam metode kualitatif bersifat terbuka dan selalu berkembang, serta menegaskan tujuan penelitian dalam istilah yang lebih spesifik. Pertanyaan penelitian kerap kali diawali dengan kata 'apa' atau 'bagaimana'.³⁶

Dalam metode kualitatif terdapat lima pendekatan dalam melakukan penelitian, yakni penelitian naratif, penelitian fenomenologis, penelitian *grounded theory*, penelitian etnografi, dan penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini secara spesifik akan digunakan pendekatan penelitian studi kasus instrumental, dimana peneliti akan berfokus pada suatu isu atau permasalahan, dan menggunakan satu kasus untuk menjelaskan isu tersebut.³⁷ Penelitian pendekatan studi kasus ini juga akan dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau literatur.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan studi pustaka dan studi literatur ini dibagi ke dalam tiga tahap kegiatan. Penulis memulai proses pengumpulan data dengan mereduksi atau

³⁵ *Ibid.*, hlm. 38-39.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

memilah data yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, akan terdapat banyak data mentah yang harus dipilah, sehingga dengan adanya proses pemilahan ini data yang ada akan lebih sederhana dan lebih fokus untuk digunakan dalam penelitian.³⁸ Tahap selanjutnya adalah tahap pemaparan data, dimana penulis akan menganalisa data yang sudah dipilah untuk mencari pernyataan yang mendukung penjelasan dalam penulisan ini. Tahap terakhir adalah tahap penyimpulan dan verifikasi data. Pada tahap ini penulis akan menyimpulkan bahwa data yang sudah melalui dua tahap sebelumnya merupakan data yang relevan, serta untuk mengkonfirmasi kebenaran dan keakuratan data untuk digunakan dalam penelitian ini.³⁹

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara garis besar akan dibagi ke dalam empat bab yang akan dibahas di dalam sistematika pembahasan berikut ini:

- **Bab I – Pendahuluan.**

Pada bagian ini, penulis memberikan dasar dan latar belakang terhadap penulisan ini. Bagian ini akan terbagi ke dalam tujuh sub-bab, antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁸ Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences; Fourth Edition*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2001), hlm. 35.

³⁹ *Ibid*, hlm. 36.

- **Bab II – Perkembangan Kebijakan Luar Negeri Rusia dan Konflik Suriah**

Pada bagian awal dari Bab II, penulis menjelaskan mengenai dinamika perkembangan Kebijakan Luar Negeri Rusia sejak berakhirnya Perang Dingin sampai periode ketiga pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Penulisan kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Konflik Suriah dengan menjabarkan penyebab yang mendasari terjadinya konflik, serta keberlangsungannya pada tahun 2011-2017.

- **Bab III – Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Konflik Suriah dan Kepentingan Nasional untuk Mendukung Pemerintah Bashar al-Assad.**

Pada bagian ini, penulis memaparkan Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Konflik Suriah melalui penerapan instrumen diplomasi dan militer. Selanjutnya penulis akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri Rusia untuk mendukung Bashar al-Assad pada Konflik Suriah. Analisa ini akan disusun berdasarkan kerangka konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein.

- **Bab IV – Kesimpulan.**

Pada bagian ini, penulis memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penulisan ini, berdasarkan pertanyaan penelitian dan teori yang telah digunakan.